

JATIM GRADUASI 360°

*Dari Tepat Sasaran, Menuju Tepat Intervensi,
Tepat Pasar, dan Tepat Graduasi,*

INOVASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



**TEPAT
SASARAN**



**TEPAT
INTERVENSI**



**TEPAT
PASAR**



**TEPAT
GRADUASI**



oleh :

**Ir. Ismail, MM
Makhfudz, SH., M.Si
Dr. Syamsul Arifin, M.Pd**

POLICY BRIEF

JATIM GRADUASI 360°

***Dari Tepat Sasaran, Menuju Tepat Intervensi, Tepat Pasar, dan Tepat Graduasi**
Mempercepat Graduasi Keluarga Miskin melalui Integrasi DTSEN, Intervensi Produktif, dan
Konektivitas Rantai Nilai*

Disusun Oleh:
Ir. Ismail, MM,
Makhfudz, SH., M.Si,
Dr. Syamsul Arifin, M.Pd.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jawa Timur memasuki fase baru penanggulangan kemiskinan. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin turun dari 9,30% menjadi 9,06%, dengan jumlah penduduk miskin berkurang 92.060 jiwa menjadi 3.712.230 jiwa. Penurunan P1 dari 1,286 menjadi 1,214 dan P2 dari 0,262 menjadi 0,239 menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya menurun secara jumlah, tetapi juga semakin berkurang kedalaman dan keparahannya.

Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan keluarga yang telah keluar dari kemiskinan mampu meningkatkan pendapatan dan tidak kembali miskin. Hal ini menjadi semakin penting karena Gini Ratio meningkat dari 0,359 menjadi 0,365, yang menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesempatan ekonomi.

Di sisi lain, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72% pada Triwulan II-2026 dan TPT Mei 2026 turun menjadi 3,42%. Namun, pada Februari 2026, baru 35,56% penduduk bekerja berada pada sektor formal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pekerjaan dan usaha yang produktif, berkelanjutan, berpendapatan layak, dan terhubung dengan pasar.

Atas dasar tersebut, **JATIM GRADUASI 360°** ditawarkan sebagai kerangka konvergensi lintas OPD dan lintas kabupaten/kota. Kerangka ini memanfaatkan DTSEN sebagai basis data, dilengkapi analisis daerah untuk memetakan hambatan keluarga, menyusun rencana graduasi, menghubungkan intervensi dengan rantai nilai, serta mengukur peningkatan pendapatan dan kemandirian secara berkelanjutan.

PERGESERAN PARADIGMA: dari 'berapa banyak bantuan disalurkan?' menjadi 'berapa banyak keluarga yang berhasil meningkatkan pendapatan dan tidak lagi bergantung pada bantuan?'

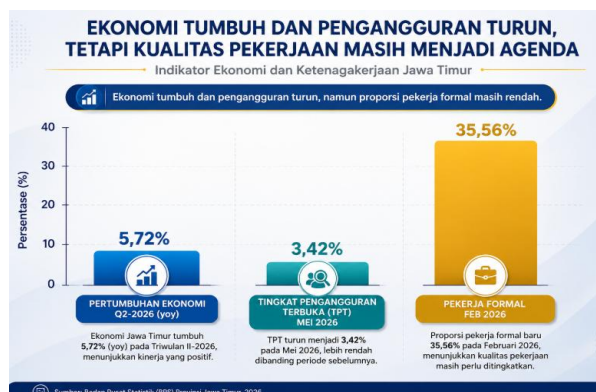
MASALAH KEBIJAKAN: NEXT POLICY FRONTIER

Kemiskinan turun, tetapi pekerjaan belum selesai

Penurunan kemiskinan Jawa Timur patut diposisikan sebagai fondasi, bukan garis akhir. Dengan 3,71 juta penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2026, skala persoalan tetap besar. Lebih jauh, jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai sekitar 2,13 juta jiwa, dibandingkan sekitar 1,58 juta jiwa di perkotaan. Sekitar 57 persen penduduk miskin dengan demikian berada di perdesaan. Konsekuensinya, desain kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan seragam; karakter mata pencaharian, akses infrastruktur, konektivitas pasar, dan potensi ekonomi lokal harus menjadi dasar penentuan intervensi.

Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi belum otomatis menjadi mobilitas ekonomi bagi semua kelompok. Pertumbuhan ekonomi 5,72 persen pada Triwulan II-2026 merupakan modal kuat bagi pembangunan, tetapi manfaat pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan kelompok miskin dan rentan. TPT yang rendah perlu diapresiasi, tetapi proporsi pekerja formal yang baru 35,56 persen memperlihatkan bahwa kualitas dan ketahanan pekerjaan masih menjadi agenda.

Dimensi ketiga adalah pemerataan. Gini Ratio yang naik menjadi 0,365 menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan berlangsung bersamaan dengan peningkatan ketimpangan pengeluaran. Ini bukan alasan untuk menegaskan capaian, melainkan sinyal bahwa kebijakan perlu naik kelas: dari kebijakan yang memastikan masyarakat bertahan hidup menuju kebijakan yang memperbesar akses kelompok miskin terhadap sumber pertumbuhan.



AKAR MASALAH DAN INOVASI KEBIJAKAN

Masalah utama bukan kekurangan program, melainkan fragmentasi hasil

Jawa Timur telah memiliki beragam instrumen perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, UMKM, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Persoalan kebijakannya adalah bahwa keluarga yang sama belum selalu mengalami satu perjalanan intervensi yang utuh. Bantuan dapat diberikan tanpa peningkatan kapasitas; pelatihan dapat dilakukan tanpa akses kerja atau pasar; modal dapat tersedia tanpa pendampingan; dan usaha dapat tumbuh tanpa kepastian pembeli. Fragmentasi tersebut membuat hubungan antara belanja pemerintah dan perubahan kesejahteraan keluarga menjadi lemah.

JATIM GRADUASI 360° mengubah rantai kebijakan tersebut menjadi: Data → Diagnosis → Intervensi → Pendampingan → Akses Pasar → Peningkatan Pendapatan → Graduasi. Pemerintah tidak diposisikan sebagai distributor program, tetapi sebagai orkestrator ekosistem yang memastikan setiap keluarga mempunyai jalur kemajuan yang jelas.

PRINSIP:

Satu keluarga — satu profil — satu rencana graduasi — satu ekosistem pendukung.

Tiga mesin perubahan

1. Data presisi: DTSEN menjadi fondasi data; analitik daerah digunakan untuk membaca kebutuhan, hambatan, potensi, dan risiko kembali miskin.
2. Intervensi produktif: keluarga ditempatkan pada jalur perlindungan, peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, atau akses rantai nilai sesuai diagnosis.
3. Market-first: pelatihan dan bantuan produktif dikaitkan sejak awal dengan kebutuhan pasar, offtaker, industri, koperasi, BUMD, pengadaan pemerintah, dan rantai pasok daerah.

Empat jalur graduasi

Jalur	Sasaran	Fokus
A - Perlindungan	Sangat rentan / belum produktif	Bansos, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, lansia, disabilitas
B - Kapasitas	Usia produktif, keterampilan terbatas	Pelatihan berbasis pasar, sertifikasi, magang, penempatan kerja
C - Pemberdayaan	Sudah memiliki aktivitas ekonomi	Modal produktif, legalitas, digitalisasi, pembiayaan, kualitas produk
D - Rantai Nilai	Siap masuk pasar	Offtaker, koperasi, BUMD, industri, marketplace, pengadaan, hilirisasi

MODEL OPERASIONAL JATIM GRADUASI 360°

Model operasional dibangun sebagai satu siklus manajemen kasus keluarga. Setiap keluarga sasaran tidak berhenti pada status penerima program, tetapi memiliki baseline, hambatan utama, intervensi prioritas, pendamping, target pendapatan, koneksi pasar, dan indikator graduasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah membedakan keluarga yang membutuhkan perlindungan intensif dari keluarga yang sudah siap didorong masuk ke pasar kerja atau rantai nilai.

Graduation Plan 12 - 24 bulan menjadi instrumen pengikat lintas-OPD. Dokumen ini berisi posisi awal keluarga, hambatan, intervensi, target pendapatan, pendamping, akses pasar, serta indikator graduasi. Dengan demikian, OPD tidak lagi bekerja berdasarkan logika program sektoral semata, melainkan berdasarkan kontribusinya terhadap perjalanan keluarga.

Dashboard Gubernur: Dari Pelaporan Menuju Policy Steering

Dashboard JATIM GRADUASI 360° dirancang untuk menjawab pertanyaan yang relevan bagi pengambilan keputusan: siapa keluarga sasaran, di mana lokasinya, mengapa miskin, intervensi apa yang diterima, OPD mana yang bertanggung jawab, berapa dukungan yang telah diberikan, bagaimana perubahan pendapatan, apakah keluarga telah masuk pasar, dan apakah terdapat tanda-tanda kembali miskin. Dashboard menggunakan status sederhana: merah untuk risiko tinggi, kuning untuk transisi, dan hijau untuk graduasi.

Tahapan implementasi 2026–2029

Tahap	Fokus	Output kunci
2026 - Piloting	Integrasi DTSEN, profil keluarga, pemetaan ekonomi, Graduation Plan, case manager, baseline	Model pilot dan baseline graduasi
2027 - Scaling up	Standardisasi, integrasi perencanaan-penganggaran, dashboard, kemitraan usaha	Model diperluas lintas kabupaten/kota
2028-2029 Institutionalization	Penguatan tata kelola, outcome budgeting, offtaker, evaluasi dampak	Graduasi menjadi mekanisme permanen

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Menetapkan JATIM GRADUASI 360° sebagai kerangka konvergensi lintas-OPD dan lintas-kabupaten/kota untuk percepatan graduasi keluarga miskin 2026–2029.
2. Menetapkan DTSEN sebagai fondasi data dan membangun Graduation Analytics Layer Jawa Timur untuk diagnosis kebutuhan dan pemantauan perjalanan keluarga.

3. Menggeser orientasi penganggaran dari sekadar output program menuju outcome pengurangan kemiskinan: peningkatan pendapatan, produktivitas, dan jumlah keluarga yang graduasi.
4. Mewajibkan One Family, One Graduation Plan bagi keluarga sasaran pada jalur pemberdayaan dan akses rantai nilai.
5. Menetapkan Market-first approach: setiap pelatihan dan intervensi produktif harus memiliki jalur menuju kerja, usaha, pembeli, offtaker, atau rantai pasok.
6. Membangun Dashboard Gubernur sebagai instrumen pengambilan keputusan dan early warning, bukan sekadar media pelaporan.
7. Mengembangkan kemitraan dunia usaha, koperasi, BUMD, perguruan tinggi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai ekosistem graduasi.

Indikator Outcome Yang Disarankan

Dimensi	Indikator	Arah Perubahan
Kemiskinan	Persentase dan jumlah penduduk miskin	Turun
Kedalaman/keparahan	P1 dan P2	Turun
Pendapatan	Rata-rata/median pendapatan keluarga sasaran	Naik
Graduasi	Jumlah/persentase keluarga yang memenuhi kriteria graduasi	Naik
Ketahanan	Keluarga yang kembali miskin pascagraduasi	Turun
Pasar	Usaha sasaran yang memperoleh akses pasar/offtaker	Naik
Ketenagakerjaan	Peserta yang terserap kerja/berusaha setelah intervensi	Naik
Tata kelola	Intervensi OPD yang menggunakan DTSEN dan Graduation Plan	Naik

UKURAN KEBERHASILAN 2029: Bukan Semakin Banyak Bantuan Tersalurkan, Tetapi Semakin Banyak Keluarga Yang Memiliki Pendapatan Produktif, Terhubung Dengan Pasar, Dan Mampu Bertahan Tanpa Ketergantungan Bantuan.

PENUTUP

Jawa Timur memiliki banyak program penanggulangan kemiskinan, tetapi tantangan utamanya adalah memastikan program tersebut terintegrasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang terukur. Capaian Maret 2026 menunjukkan kemajuan positif, namun meningkatnya ketimpangan dan masih rendahnya pekerja formal menegaskan perlunya memperkuat mobilitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, **JATIM GRADUASI 360°** hadir bukan sebagai program baru, melainkan sebagai strategi untuk mengorkestrasi program yang telah tersedia. DTSEN menjadi fondasi

data, *Graduation Analytics Layer* memetakan kebutuhan keluarga, *Graduation Plan* mengintegrasikan intervensi, pendekatan *market-first* membuka akses terhadap peluang ekonomi, dan dashboard kebijakan memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara terpadu, terukur, dan berbasis bukti.

**DATA → DIAGNOSIS → INTERVENSI → PENDAMPINGAN → PASAR
→ PENDAPATAN → GRADUASI**

Jika Jawa Timur ingin menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai mesin mobilitas sosial, maka keluarga miskin harus ditempatkan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek pembangunan yang dipersiapkan untuk menjadi pekerja produktif, pelaku usaha, pemasok rantai nilai, dan bagian dari transformasi ekonomi daerah. Inilah next policy frontier penanggulangan kemiskinan Jawa Timur.

Sumber Data Dan Rujukan

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026). Gini Ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,365. Rilis 5 Agustus 2026.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026). Ekonomi Jawa Timur Triwulan II-2026 Tumbuh 5,72 Persen (Y-on-Y). Rilis 5 Agustus 2026.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2026 mencapai 25,14 juta orang. Rilis 5 Mei 2026.
- ANTARA News Jawa Timur. (2026). Penduduk miskin di Jatim turun 92,1 ribu jadi 3,71 juta orang. 5 Agustus 2026.
- Bakorwil II Bojonegoro, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2026). Jawa Timur catat kinerja positif pada Semester I 2026; memuat perkembangan kemiskinan, P1, P2, dan ketenagakerjaan.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; serta Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2025). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.